



## Peran Pemerintah Menaikan Kualitas Hidup Masyarakat Lewat Program BSPS

Arif Alfiansyah<sup>1</sup>, Ririt Iriani Sri Setiawati<sup>2</sup>, Mohammad Wahed<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

---

### Abstract

Received: 17 September 2023  
Revised: 24 September 2023  
Accepted: 30 September 2023

*To improve the quality of life of the community, of course, it can be through various aspects. One aspect that can improve the quality of life of the community is to have decent housing. The government's role in efforts to improve the quality of decent housing to help the community, especially low-income people, is the Self-Help Stimulant Assistance Program (BSPS). In this BSPS Program, the author as a companion to the empowerment facilitator is tasked with assisting the implementation of the BSPS program in the Jeruk sub-district of Surabaya City. Which includes the stages of Field Verification, Socialization and Counseling, Self-Help Identification, Group Workshop, Determination of Work Schedules and Material Requests, Construction Assistance. The purpose of this service is to ignore the quality of a livable house and provide knowledge of the importance of decent housing through the role of the community in issuing its self-reliance. The service carried out in the Orange Village of Surabaya through the BSPS program has borne fruit, with the proof that the community is open to the existence of this BSPS program and people who want to spend their self-help in the form of cash, and the existence of mutual assistance between communities to provide assistance in the form of energy in the process of working on the BSPS program house.*

**Keywords:** *BSPS, Quality of Life of the Community, Livable Houses, The Role of Government*

(\*) Corresponding Author: [arifalfian290302@gmail.com](mailto:arifalfian290302@gmail.com)

**How to Cite:** Alfiansyah A, Setiawati R I S, & Wahed M. (2023). Peran Pemerintah Menaikan Kualitas Hidup Masyarakat Lewat Program BSPS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8399205>

---

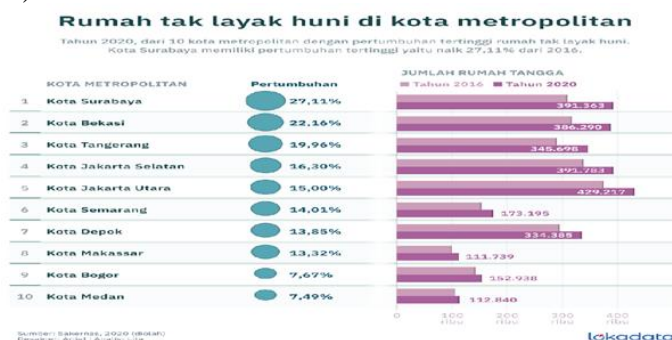
### INTRODUCTION

Kualitas hidup masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek di antaranya kepadatan penduduk, kemiskinan, pengangguran ketersediaan fasilitas – fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, pola hidup yang dianut oleh masyarakat, norma yang berlaku di suatu daerah dan lain-lain. Salah satu untuk menaikan kualitas hidup masyarakat adalah dengan menekan angka kemiskinan di suatu daerah atau wilayah.

Kemiskinan merupakan masalah disetiap negara. Semua negara pasti mempunyai berbagai cara untuk menangani masalah kemiskinan, peran pemerintah juga tidak luput untuk menangani masalah kemiskinan khususnya di negara Indonesia. Menurut Niemiets dalam (Ni Putu & I made, 2014) kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan guna membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal, seperti tidak keseimbangannya angka usia kerja dengan lapangan pekerjaan. Badan pusat statistik mencatat bahwa kemiskinan di negara Indonesia ini pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang atau naik 0,20 juta orang dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 26,16 juta orang. Pada tahun 2022 penduduk miskin di kota Surabaya mencapai 138,21 ribu jiwa hal ini mengalami penurunan

dibanding tahun 2021 yang mencapai 152,49 ribu jiwa sedangkan ditahun 2020 kota Surabaya penduduk miskinnya di angka 145,67 ribu jiwa. (Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2022). Kondisi populasi manusia yang semakin meningkat namun berbanding terbalik dengan lapangan pekerjaan membuat ketimpangan kesejahteraan semakin tinggi, oleh karena itu dalam mengakomodasi semua orang, kita perlu membangun tata kota yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi tingkat kemiskinan di kota Surabaya pemerintah kota Surabaya membuat beberapa kebijakan. Program rumah tidak layak huni adalah salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah kota Surabaya dikarenakan rumah merupakan kebutuhan primer yang berfungsi sebagai pusat pendidikan keluarga, sekaligus tempat berlindung. Selain itu rumah mampu dikategorikan sebagai wadah generasi muda membangun cagar budaya serta peningkatan kualitas yang ada pada diri mereka. Pengertian dan gambaran dari rumah tidak layak huni menurut Permensos 20/3017 dalam “Pasal 1 ayat 1 adalah Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.” Kriteria RTLH yakni ketika bangunan hunian rusak dalam (Atap, Lantai, Dinding). (MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 2017)



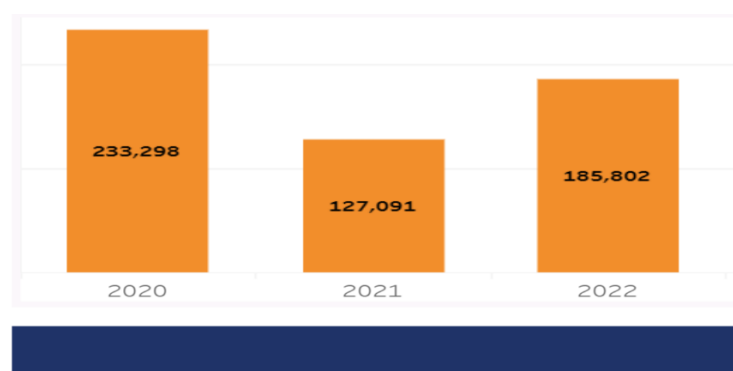
Grafik 1. Jumlah kenaikan rumah tak layak huni di kota

Dari grafik diatas dapat dilihat dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 jumlah rumah tidak layak huni mengalami kenaikan sebesar 27,13% dengan angka 391,363 rumah yang tidak layak huni, Surabaya menempati posisi pertama dalam hal peningkatan rumah tidak layak huni. Hal ini bisa dikatakan miris karena Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Pembangunan dan insfratruktur di Surabaya pun juga bisa dibilang maju. Banyaknya penduduk yang urbanisasi dari desa ke kota Surabaya ini lah yang membuat angka kepadatan penduduk disurabaya ikut naik. Para masyarakat desa berbondong – bondong ke kota Surabaya ingin merubah nasib sehingga lahan yang tadinya merupakan lahan hijau diubah menjadi lahan padat pemukiman. Dampaknya adalah munculnya rumah – rumah yang tidak tertata, berdempetan, rumah yang tidak layak huni. Yang mana dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi, seperti kesenjangan sosial, pengangguran, kemiskinan, kriminalitas(Nisa & Salomo, 2019).

Pemerintahan kota Surabaya membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini melalui program rehabilitas rumah tidak layak huni terlepas dari adanya program dandan omah. Program dandan omah merupakan salah satu program yang dimiliki oleh pemerintah kota Surabaya, dengan adanya dandan

omah ini pemerintah surabaya mampu mengurangi rumah tidak layak huni. Tetapi terdapat program yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara rehabilitas rumah tidak layak huni melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). BSPS dapat didefinisikan sebagai fasilitas dari pemerintah pusat melalui perantara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan adanya program ini masyarakat dengan gaji rendah dapat diberikan tunjangan dana atau pancangan sehingga mampu meningkatkan serta mendorong keswadayaan masyarakat, sehingga secara langsung mampu meningkatkan kualitas bangunan dan rumah. Usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi Rumah Tidak Layak Huni ini masih terelasiakan hingga saat ini. Peraturan Menteri dan Undang-Undang yang sebelumnya telah menjelaskan terkait dengan BSPS, dijelaskan bahwa salah satu usaha pemerintah dalam memperhatikan krisis kebutuhan rumah layak huni yaitu melalui program BSPS. BSPS bekerjasama dengan Finah Pekerjaan Umum (PU) kemudian dilaksanakan dan dirancang oleh Kementerian Perumahan yang jatahnya dialokasikan ke Desa, Kabupaten dan Provinsi. Besaran dana yang diberikan oleh kementrian PUPR dalam program BSPS ini dengan nominal 20 juta rupiah, 17,5 juta berupa material dan 2,5 juta berupa anggaran untuk upah tukang. Memang untuk membangun rumah tidaklah cukup dengan dana sekian, maka dari itu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BPR) merupakan sasaran dari program ini. Sehingga diharapkan dari bantuan ini masyarakat mau berswadaya untuk memperbaiki tempat tinggal yang layak. Swadaya masyarakat ini tidak hanya dengan materi atau uang melainkan bisa juga dengan material material yang masih layak untuk dipakai kembali, atau juga bisa dengan tenaga kerja untuk membangun rumah penerima bantuan tersebut.

BSPS sendiri diatur pada Surat Edaran Dirjen Perumahan Nomor 14/SE/Dr/2022 dalam Peraturan Menteri PUPR No 7 Tahun 2022 mengenai petunjuk penyelenggaraan program BSPS. Tujuan dari program BSPS ini adalah meningkatkan dan mendorong keswadayaan individu sehingga dapat terpenuhi akses untuk kebutuhan rumah layak huni secara swadaya.



Grafik.2 Neraca Capaian Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2022  
Bisa dilihat pada grafik tersebut kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pembiayaan berupa bantuan pembenahan rumah yang tidak layak huni grafik tersebut adalah grafik pencapaian bantuan perumahan swadaya. Dari grafik tersebut pada tahun 2020 penanganan untuk rumah layak huni mencapai 200 ribuan dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yakni sekitar 127 ribu dan

untuk tahun 2022 mengalami kenaikan sekitar 58 ribu unit. Dari grafik tersebut dapat dikatakan bahwa kementerian PUPR harus meningkatkan lagi untuk program ini agar kualitas untuk rumah yang layak huni dapat terpenuhi.

KECAMATAN	KELURAHAN	DATA PKE	DATA REGULER	TOTAL
SEMAMPIR	UJUNG	1	0	1
BENOWO	SEMEMI	2	0	2
TANDES	MANUKAN KULON	18	0	18
LAKARSANTRI	JERUK	27	37	64
TAMBAKSARI	PACAR KELING	7		7
TAMBAKSARI	KAPAS MADYA	2	39	41
TAMBAKSARI	RANKAH	5	12	17
KARANGPILANG	KEDURUS	4	62	66
GAYUNGAN	GAYUNGAN	0	47	47
GAYUNGAN	MENAGGAL	0	5	5
GAYUNGAN	DUKUH MENANGGAL	0	8	8
<b>TOTAL</b>		66	210	276

Tabel. 1 Jumlah penerima bantuan program BSPS Surabaya.

Salah satu wilayah yang menjadi pelaksanaan program BSPS ini adalah Surabaya. Berdasarkan tabel diatas Surabaya pada tahun2023 mengajukan 11 kelurahan untuk menerima bantuan program BSPS ini yang terbagai menjadi 2 kategori. Yakni kategori PKE atau Program Kemsikinan Ekstrim dan kategori usulan yang di usulkan oleh kelurahan setempat(Julianto, 2020). Dari 11 kelurahan tersebut yang lolos untuk memenuhi program BSPS ini 276 penerima bantuan program BSPS. Program BSPS ini adalah program yang sangat bagus program ini dapat menaikkan kualitas hidup masyarakat seperti masyarakat di perkotaan yang kurangnya kualitas bangunan rumah. Seperti yang kita tahu bahwa kepadatan penduduk di perkotaan membuat menurunnya kualitas rumah yang tidak layak. Dampak yang ditimbulkan dari kualitas rumah yang tidak layak adalah kesenjangan sosial, seperti menimbulkan penyakit karena krangnya penghawaan dalam bangunan rumah, dapat menimbulkan kecelakaan karena tata letak rumah yang berdempetan, pengeluaran dana untuk meningkatkan kualitas rumah, ketidaknyamanan dan menimbulkan rasa tidak aman pada tempat tinggal, naiknya kriminalitas dan lain sebagainya.

Pada penelitian yang dilakukan (Herlina Dewi, 2021) bahwa program BSPS berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan dan menaikkan kualitas hidup masyarakat. Dalam penelitian beliau menyatakan bahwa program BSPS ini dapat mempengaruhi tingkat kualitas hidup ekonomi masyarakat dan secara tidak langsung secara mengurangi beban biaya masyarakat guna memperbaiki tempat tinggalnya karena masyarakat tersebut sudah mendapatkan bantuan untuk membenahi rumahnya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa jika pemenuhan akan bangunan rumah yang layak huni maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan lainnya seperti kesehatan, atau peningkatann sandang papanya sehingga dapat menaikkan kualitas hidupnya..

## METHODS

Metode pelaksanaan yang dilakukan pengabdian adalah dengan bentuk pendampingan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni pada program BSPS di lokasi pengabdian pada Kabupaten Ponorogo dengan data berupa materi

Kementerian PUPR dan terkait program BSPS yang diberikan oleh pihak Dirjen perumahan selain itu juga dari data berupa tahapan membangun rumah layak huni yang didapat dari website resmi Kementerian PUPR dan Ditjen Perumahan serta dokumentasi penerapan di lapangan yaitu Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya. Data-data tersebut akan disajikan oleh pengabdian untuk disusun agar memudahkan pembaca dalam memahami terkait program BSPS hingga modul langkah-langkah untuk membangun Rumah Layak Huni sesuai Petunjuk Teknis Dirjen Perumahan Kementerian PUPR.

## **RESULTS & DISCUSSION**

### ***Results***

#### **Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

Pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai sistematis pelaksanaan Program BSPS pada “Surat Edaran Dirjen Perumahan Nomor 14/SE/Dr/2022” (Perumahan, 2022) Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Menjelaskan bahwa “Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan”. pada “Surat Edaran Dirjen Perumahan Nomor 14/SE/Dr/2022” dijelaskan tentang standart Rumah Layak Huni yakni :

I. Terdapat dua persyaratan standar yaitu standar kualitas komponen non bangunan seperti ketahanan bangunan meliputi daun pintu, jendela serta kusen, dinding, lantai dan penutup atap. Standar komponen struktur meliputi rangka atap, balok bawah atau sloof, pondasi, balok atas atau ring balok dan tiang atau kolom. Dan yang terakhir yaitu bahan bangunan atau enam campuran dan dimensi, termasuk dalam kualitas komponen struktur.

II. kecukupan luas tempat tinggal, maksudnya adalah luas bangunan yang sesuai dengan peraturan dari Dirjen pupr yakni dapat dihitung minimal per orang adalah 7,2 meter persegi untuk ruang gerakannya dan mempunyai standr tinggi bangunan adalah 2.8 meter pemenuhan . Pemenuhan luasan rumah memperhatikan kemampuan berswadaya dan ketersediaan lahan.

III. akses pembuangan limbah yang layak, pembuangan limbah atau Sanitasi layak dapat berupa bangunan sebagai sarana septictank dan Mandi Cuci Kakus (MCK) yang layak, saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, dan sistem pembuangan air limbah. Sanitasi dapat berada di halamam rumah, kominal, atau dalam rumah dengan jarak dan akses yang terjangkau sehingga mampu memfasilitasi seluruh anggota keluarga.

IV. akses air minum layak, Akses air minum layak seperti pemenuhan akses air minum yang memenuhi standar air untuk dikonsumsi dan mudah dijangkau dari sisi waktu atau jarak tempuh. **Sampek kene**

#### **Implementasi Program BSPS di Surabaya**

Pada pelaksanaan program BSPS di kota Surabaya khususnya di kelurahan Jeruk masyarakat kelurahan Jeruk sangat menerima atau terbuka dengan adanya program BSPS karena dinilai program ini mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat jeruk. Karena jika dilihat demografi penduduk di wilayah kelurahan jeruk ini bisa dibilang padat. Tidak dapat dipungkiri juga walaupun di

wilayah perkotaan masih terdapat tempat tinggal yang tidak layak untuk dihuni. Oleh sebab itu dengan adanya program BSPS ini dapat menaikkan kualitas hidup masyarakat dengan mengurangi bangunan rumah yang tidak layak huni. Di kelurahan jeruk kecamatan lakarsantri ini penulis melakukan pengabdian sebagai pendamping masyarakat untuk mendampingi serta mengarahkan masyarakat untuk mengikuti tahapan tahapan yang sesuai dengan peraturan program BSPS. sistematis atau tahapan tahapan program BSPS dari persiapan pembangunan sampai dengan pelaksanaan pembanguna diantaranya sebagai berikut.

### **Verifikasi Lapangan**



Tahapan yang dilakukan pertama pada program BSPS ini adalah melakukan pengecekan kualitas rumah milik calon penerima bantuan. dalam tahapan ini penulis dan Tenaga Fasilitator lapangan memvalidasi data apakah calon penerima bantuan layak mendapatkan bantuan perbantuan rumah layak huni. Dan melakukan pengecekan tentang legalitas tanah yang dihuni oleh calon penerima bantuan. legalitas tanah yang sesuai kriteria program BSPS ini adalah berupa Surat Hak Milik tanah dan bangunan, Petok D, Letter C atau memiliki surat Ahli Waris. Tanah yang dihuni bukanlah tanah milik Negara Atau pun tanah milik perusahaan Swasta. Di kelurahan jeruk sendiri terdapat 64 penerima bantuan yang sudah lolos untuk tahapan verifikasi lapangan ini.

### **Sosialisai dan Penyuluhan**



Vembriarto mengemukakan dalam (Airlangga, 2015) Sosialisasi merupakan suatu proses belajar yaitu mengakomodasi bagaimana individu menahan, mengubah impuls-impuls pada dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakat sekitarnya. Metode yang diambil oleh penulis untuk dalam hal sosialisai program BSPS ini adalah dengan mengumpulkan penerima bantuan pada kantor kelurahan di kelurahan Jeruk secara langsung dan dihadiri oleh aparaturnya kelurahan, dan kelompok masyarakat. Adapun kegiatan tersebut dengan menjelaskan abstraksi sistematis program BSPS, serta menjelaskan bagaimana bangunan yang

layak untuk dihuni serta bagaimana dampak jika bangunan tersebut tidak layak dihuni.

**Identifikasi Dana dan Keswadayaan**

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)	Dana Bantuan	Dana Pensiil	Memakai Bahan Bangunan Lama
I	Pekerjaan Persiapan						
I	Bongkar Bangunan Lama	1,0 ls	500.000	500.000	-	-	500.000
II	Pekerjaan Pondasi						
I	Pekerjaan Pondasi Beton bertulang uk 50x50 cm	2,0 lp	82.000	164.000	-	-	-
	- Batas Beton @ 10 mm H&H&K	2,0 lp	57.000	114.000	-	-	-
	- Semen @ 40 Kg uk. Tiga Roda	2,0 zak	57.000	114.000	-	-	-
	- Pasir Beton ex.kumpang	0,2 m <sup>3</sup>	350.000	70.000	-	-	-
	- Batu Pasah ex.Merah	0,4 m <sup>3</sup>	350.000	140.000	-	-	-
III	Pekerjaan Dinding						
I	Caru Beton Sempul ukuran 15 x 20 cm	0,0 lp	82.000	738.000	738.000	-	-
	- Batas Beton @ 10 mm H&H&K	0,0 lp	57.000	418.000	418.000	-	-
	- Semen @ 40 Kg uk. Tiga Roda	0,0 zak	57.000	285.000	285.000	-	-
	- Pasir Beton ex.kumpang	0,00 m <sup>3</sup>	350.000	375.000	375.000	-	-
	- Batu Pasah ex.Merah	0,00 m <sup>3</sup>	350.000	175.000	175.000	-	-
IV	Pekerjaan Lantai						
I	Pekerjaan Behisting						
I	Caru Beton Sempul ukuran 15 x 35 cm	12,0 lp	82.000	984.000	820.000	164.000	-
	- Batas Beton @ 10 mm H&H&K	12,0 lp	57.000	684.000	418.000	266.000	-
	- Semen @ 40 Kg uk. Tiga Roda	2,0 zak	57.000	399.000	399.000	-	-
	- Pasir Beton ex.kumpang	1,0 m <sup>3</sup>	350.000	350.000	350.000	-	-
	- Batu Pasah ex.Merah	1,0 m <sup>3</sup>	350.000	350.000	350.000	-	-
V	Pinting						
I	Tembok	8,0 zak	72.000	576.000	504.000	72.000	-
	- Batas ringan merk Facion	8,0 zak	85.000	680.000	3.385.000	695.000	-
	- Pasir Arang ex.ong	2,0 m <sup>3</sup>	240.000	480.000	-	-	-
	- Semen @ 40 Kg uk. Tiga Roda	7,0 zak	57.000	399.000	-	-	-
1 Bentuk Swadaya : Uraian Urutan				Besaran/Jumlah : Rp. 1.424.000,00			
Besaran/Jumlah : Rp. 8.435.000,00							

Menurut Verhagen dalam (Syarifuddin, 2016)Swadaya (self-help) merupakan suatu tindakan sukarela yang dikerjakan oleh individu atau kelompok orang yang mempunyai tujuan untuk kepuasan kebutuhan-kebutuhan atau aspirasi aspirasi individual dan bersama. Sesuai dengan yang kemukakan oleh Isbandi program ini bertujuan untuk potensi masyarakat dalam memperbaiki rumah yang dihuninya. Dalam artian program BSPS ini bertujuan menggali keswadayaan penerima bantuan agar mau memaksimalkan pembangunan rumah yang dihuninya. Dalam pengabdian penulis ini di kelurahan Jeruk, rata rata keswadayaan masyarakat berupa uang tunia dan material yang masih layak digunakan kembali juga tenaga karena penerima bantuan dikelurahan jeruk ini ikut menegerjakan pembanguanan rumahnya. Karena di daerah Surabaya tidak ada yang memelihara hewan ternak ddan hasil tani. Untuk dana yang diberikan oleh program BSPS adalah 20 juta, yang dimana 17.5 juta digunakan sebagai pemebelihan material dan 2.5 sebagai pembayaran upah tukang.

**Rembuk Kelompok Penetapan Jadwal Kerja dan Permintaan Material**



Rembug artinya musyawarah yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait untuk mencari jalan tengah keputusan (Huda, Anam Miftakhul Huda, 2016)Dalam rembug ini membahas kegiatan pencapaian target pembangunan. Para penerima bantuan dan tukang di tetap kan untuk menyelesaikan pembangunan rumah dalam kurun waktu 20 hari hal ini akan menjadi lebih efisien untuk penegerjaan rumah milik penerima bantuan. dan juga pada kegiatan rembug ini penulis didampingi

dengan TFL melakukan musyawarah untuk keperluan material apa saja yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah, yang pastinya dengan mematuhi ketentuan dari petunjuk teknis program BSPS.

### **Pendampingan Konstruksi**



Tahapan selanjutnya adalah pendampingan konstruksi yang dimana penulis bertugas sebagai memonitoring tukang dan penerima bantuan agar mengerjakan pembangunan sesuai petunjuk teknis Program BSPS. Pendampingan yang dilakukan oleh penulis tidak hanya secara teknis saja tetapi juga melalui pemberdayaan. Yakni dengan melakukan pendekatan atau memberi informasi mengenai bagaimana teknis membangun rumah yang layak huni, sehingga penerima bantuan dan tukang nya mengerti serta menambah wawasan baru juga untuk mereka. Pendampingan yang dilakukan oleh penulis di kelurahan Jeruk membuahkan hasil bahwa penerima bantuan jadi lebih paham mengenai pembangunan rumah yang layak huni. Selain itu pendampingan ini juga memepererat rasa gotong royong dan kekeluargaan hal ini dibuktikan dengan adanya saling membantu antara masyarakat ketika proses pembangunan rumah milik penerima bantuan

### **Dampak BSPS Terhadap Kualitas Hidup**

Salah satu faktor yang dapat dipengaruhi sehingga kualitas hidup seseorang meningkat adalah peningkatan kualitas tempat tinggal menurut penelitian yang dilakukan oleh program BSPS yang berfokus pada peningkatan kelayakan rumah secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup (Herlina Dewi, 2021). Dengan rumah yang layak huni penerima bantuan memiliki rasa aman dan nyaman juga terhindar dari penyakit, penerima bantuan juga merasa percaya diri karena tidak adanya tanggungan untuk memperbaiki rumah nya, serta beban dana untuk memperbaiki rumah yang layak dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Serta dengan adanya aprogram BSPS ini berdampak pada kehidupan sosial, dilihat dari rasa gotong royong dan saling membantu antar sesama masyarakat untuk membangun rumah yang layak huni dan memeper erat rasa kekeluargaan. Maka dalam pendampingan Program BSPS yang dilakukan oleh penulis di kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Surabaya membuktikan peran pemerintah melalui Program BSPS ini dapat meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di kelurahan Jeruk.

### **Discussion**

#### **Rumah Layak Huni**

Berdasarkan “SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN NOMOR: /SE/Dr/2022” (Perumahan, 2022). Rumah layak huni dapat didefinisikan sebuah tempat singgah yang memenuhi standart kesehatan seperti penghawaan yang minimal harus 5% (lima persen) atas luas lantai ruangan (bukaan jendela) dengan mengedepankan sirkulasi udara dan pencahayaan minimum 10% (sepuluh persen) atas luas lantai bangunan (sinar matahari). selain itu terdapat empat standar teknis bangunan gedung seperti dengan fasilitas, prasarana dan sarana umum yang lengkap dan memenuhi standart, standart kecukupan luas tempat tinggal, ketahanan bangunan dan akses air minum yang sehat dan layak.

### **Kemiskinan**

Menurut Niemietz dalam (Ni Putu & I made, 2014) mendefinisikan kemiskinan sebagai tidak kompetennya seseorang membeli kebutuhan dasar berupa barang seperti pakaian, obat-obatan, papan dan makanan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (2016), kemiskinan adalah minimnya ekonomi seseorang yang diukur dari segi pengeluaran sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar bukan makanan dan kebutuhan dasar makanan. Kemudian menurut Kuncoro (2000) kemiskinan adalah tidak memadainya seseorang dalam memenuhi standart hidup minimum. Oleh karena itu, dapat digaris bawahi bahwa kemiskinan ialah salah satu keadaan individu, individu atau suatu masyarkat yang tidak mampu meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik atau layak sehingga dapat dibilang tidak mampu menaikan standarisasi hidup masyarakat yang lebih baik.

### **Program BSPS**

Berdasarkan “SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN NOMOR: /SE/Dr/2022” (Perumahan, 2022) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS merupakan suatu cara untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan berasaskan gotong-royong melalui tunjangan dana yang diberikan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan kategori pra sejahtera. BSPS adalah peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan melalui tunjangan dana yang diberikan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

### **Kualitas hidup**

Setiap individu mempunyai kualitas hidup yang berbeda satu sama lain tergantung bagaimana cara individu tersebut menyikapi suatu permasalahan. Kualitas hidup seseorang akan baik apabila cara ia menyikapi masalah dengan bersikap positif, begitu pula sebaliknya kualitas hidup seseorang akan buruk apabila menyikapi permasalahan dengan sikap negatif. Coons dalam (Suparyanto, 2020) menyatakan bahwa kualitas hidup merupakan sesuatu yang dapat diartikan secara umum dan terdiri dari beberapa dimensi dan komponen sehingga berkaitan erat dengan kesehatan meliputi keadaan psikologis, pemyakit, fungsi fisik dan fungsi sosial serta perawatannya. Menurut Cohen dan Lazarus, kualitas hidup merupakan kelebihan seseorang yang ada dalam kehidupan mereka. Hubungan interpeesonal, intelektual, kontrol budaya, perkembangan prinadi, kondisi mageri serta tujuan hidup merupakan bentuk-bentuk dari kelebihan seseorang.

### **Peran pemerintah**

Menurut Soekanto dalam (Nurmalina, 2019), peranan yaitu status atau aspek dinamis daam suatu kedudukan. Individu dikatakan melakukan suatu peranan jika ia mampu menjalankan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Terdapat beberapa pandangan serta pendapat yang sangat bervariasi dalam mendefinisikan peran. W.S Sayre (1960) mendefinisikan bahwa pemerintah ialah suatu organisasi dalam negara yang menjalankan kekuasaan dan memperlihatkannya. kemudian David Apter (1977), mengemukakan bahwa pemerintah merupakan kesatuan anggota yang mempunyai tanggung jawab tertentu sehingga mampu mempertahankan monopoli praktis dan sisten yang mencakup kekuasaannya. Sedangkan Iyas Yusuf (2014:05) menyatakan fungsi pemerintah yang berkaitan dalam pemberdayaan yaitu sebagai arah kemandirian dan pembangunan bagi masyarakat demi terciptanya suatu kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat sehingga perlunya peran pemerintah secara mendalam dan optimal untuk membangun masyarakat menjadi sejahterah.

## CONCLUSION

Rumah layak hunia adalah hunian yang mempunyai kategori standar teknis. Bangunan hunian yang dilengkapi dengan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum dan memenuhi standart, yakni kekokohan bangunan, luas tempat tinggal yang cukup, akses sanitasi pembuangan layak, akses air minum yang sehat dan layak . Selain indikator yang sudah disebutkan tersebut, rumah layak huni juga memenuhi syarat kesehatan seperti pencahayaan dan penghawaan. Peran pemerintah melalui Program BSPS untuk memenuhi kebutuhan kelayakan rumah dengan keswadayaan dan tenaga dari masyarakat itu sendiri. Pendampingan yang dilakukan oleh penulis dalam pelaksanaan program BSPS di Surabaya untuk meningkatkannya kualitas hidup masyarakat di kelurahan Jeruk ini membuahkan hasil. Dengan adanya antusias dari masyarakat dan para pejabat kelurahan yang sangat terbuka dengan adanya program BSPS ini. dan antusias penerima bantuan yang ingin meningkatkan kualitas rumahnya dengan mengeluarkan keswadaanya berupa uang tunai dari tabungan mereka. Selain itu juga menimbulkan rasa kekeluargaan yang sangat besar dan gotong royong masyarakat untuk membantu pembangunan rumah milik penerima bantuan.

## REFERENCES

- Airlangga, D. (2015). Sosialisasi Tentang Pengetahuan Keagamaan Oleh Orang Tua Beda Agama Kepada Anaknya. *Jurnal Sosial Dan Politik*, 1–24.
- Herlina Dewi. (2021). ANALISIS PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DALAM MENYEDIAKAN RUMAH LAYAK HUNI DI KELURAHAN BEROHOL KECAMATAN BAJENIS KOTA TEBING TINGGI. *Studia Economica*, 8(1), 1–13.
- Huda, Anam Miftakhul Huda, and V. S. K. (2016). Model Guyup Rembug Dalam Penyelesaian Konflik. *JURNAL TRANSLITERA*, 4(2), 1–16.
- Julianto, P. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru (2020). *Qawwam : The Leader's Writing*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v1i2.79>
- MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA. (2017). *PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN SARANA PRASARANA LINGKUNGAN* (Vol. 87, Issue 1,2, pp. 149–200).

- Ni Putu & I made. (2014). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali tahun 2004-2013*. 11–25.
- Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7>
- Nurmalina, R. (2019). peran pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. In *UIN SUSKA RIAU*. UIN SUSKA RIAU.
- Perumahan, D. J. (2022). *SENo14SEDr2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program BSPPS* (p. 364). Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Perumahan.
- Suparyanto, R. (2020). Kualitas hidup lansia. *Seminar Nasional Keperawatan Universitas Satya Wacana*, 5(3), 11–21.
- Syarifuddin. (2016). SWADAYA MASYRAKAT DALAM PEMBANGUNAN GAMPONG AWEEK KECAMATAN KOTA JANTHO KABUPATEN ACEH BESAR. In *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH* (Vol. 147, Issue March). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.